



Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2024

Shavera Sofiana Malia

Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: shaverasofiana4061@gmail.com*

Abstract. *Income inequality is one of the crucial issues in regional economic development because it affects people's welfare and social stability. This study aims to examine the dynamics of income inequality in Grobogan Regency during the period 2021–2024 using the Gini Index as the main indicator, and to examine the factors that influence it, such as education level, poverty, GRDP per capita, and labor force participation rate. This study uses a quantitative descriptive method with secondary data from BPS. The research findings show that the Gini Index in Grobogan Regency fluctuates, but in general tends to decline until 2023 before increasing slightly again in 2024. The development of education shows an improving trend, although it is still below the provincial and national averages. The decline in poverty rates and growth in GRDP per capita also play a role in reducing inequality. However, the dominance of the informal sector and limited mobility of workers between sectors are obstacles to further reducing inequality. Therefore, integrated steps are needed through improving the quality of education, creating productive jobs, and strengthening social protection programs in order to realize inclusive and equitable economic growth in Grobogan Regency.*

Keywords : *Income Inequality, Education, Poverty, PDRB, Labor Force Participation Rate*

Abstrak. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu isu krusial dalam pembangunan ekonomi daerah karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2024 dengan menggunakan Indeks Gini sebagai indikator utama, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti tingkat pendidikan, kemiskinan, PDRB per kapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari BPS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indeks Gini di Kabupaten Grobogan mengalami fluktuasi, namun secara umum cenderung menurun hingga 2023 sebelum kembali naik sedikit pada 2024. Perkembangan pendidikan menunjukkan tren yang membaik, meski masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penurunan tingkat kemiskinan serta pertumbuhan PDRB per kapita juga berperan dalam menurunkan ketimpangan. Namun, masih dominannya sektor informal dan terbatasnya mobilitas pekerja antar sektor menjadi hambatan dalam menekan ketimpangan lebih jauh. Oleh sebab itu, diperlukan langkah terpadu melalui peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang produktif, dan penguatan program perlindungan sosial guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Grobogan.

Katakunci : Ketimpangan Pendapatan, Pendidikan, Kemiskinan, PDRB, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu ekonomi yang paling mendesak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan tidak terdistribusi secara adil di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan yang lebar antara masyarakat yang memiliki kekayaan dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang menguntungkan. Menurut Smith dan Todaro (2006) menjelaskan ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Fenomena ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi

masalah ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang serius, seperti meningkatnya ketidakstabilan sosial dan menurunnya kualitas hidup sebagian besar masyarakat. Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja, ditambah dengan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kelompok tertentu. Dampak ketimpangan pendapatan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dapat memicu ketegangan sosial, memperburuk kondisi kemiskinan, dan meningkatkan ketidakstabilan politik. Masyarakat yang merasa tersisihkan dan tidak memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya berpotensi mengalami kekecewaan, yang pada akhirnya dapat memicu demonstrasi, konflik, atau bahkan kerusuhan.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketika sebagian besar masyarakat memiliki daya beli yang rendah, permintaan terhadap barang dan jasa cenderung melemah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan investasi dan inovasi. Oleh karena itu, upaya mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi hal yang krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam skala global, isu ketimpangan pendapatan menjadi perhatian utama organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia, yang terus berupaya merumuskan kebijakan serta program guna mengurangi ketimpangan pendapatan. Kemudian melalui berbagai inisiatif, diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan menjadi perhatian utama di tingkat global dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-10, secara tegas menargetkan pengurangan kesenjangan di dalam dan antar negara. Sasaran ini menunjukkan kesadaran bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melemahkan kohesi sosial, dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu ukuran utama untuk mengevaluasi ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini, yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli statistik Italia, Corrado Gini pada tahun 1912, merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Indeks ini menjadi salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi untuk menilai distribusi pendapatan di berbagai negara atau wilayah. Menurut Todaro dan Smith (2006), Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan yang

menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan menyimpang dari distribusi yang sepenuhnya merata.

Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu daerah agraris utama di Jawa Tengah, memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan luas lahan sawah yang mencapai sekitar 63.955 hektar. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada pertanian, khususnya produksi padi, jagung, dan kedelai. Potensi ini menjadikan Grobogan sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah. Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Grobogan menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di wilayahnya. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi dan menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah kabupaten (BPS Kabupaten Grobogan, 2024). Ketimpangan ini dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja, namun dengan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan sektor lain.

Perbedaan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar antar wilayah di Grobogan juga memperparah ketimpangan tersebut. Beberapa kecamatan yang mengalami perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian menunjukkan penurunan luas lahan panen, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan pendapatan petani. Kondisi ini menuntut adanya strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat pertanian tetapi juga di wilayah yang lebih berkembang secara ekonomi. Dalam penelitian ini, dengan menganalisis perkembangan ketimpangan pendapatan sangat penting karena menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis tren ketimpangan, seperti menggunakan Indeks Gini, membantu pemerintah memahami dinamika distribusi pendapatan dan merancang intervensi yang tepat sasaran guna mencapai pemerataan ekonomi (Todaro & Smith, 2015; Ravallion, 2014). Dengan demikian, analisis ketimpangan pendapatan bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen strategis untuk pembangunan yang lebih adil dan inklusif (Amin, 2019).

Ketimpangan pendapatan adalah konsep yang menggambarkan perbedaan tingkat kekayaan, taraf hidup, dan pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam masyarakat yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata antar wilayah (Gurusinga, 2022). Ketimpangan ini merupakan salah satu aspek kemiskinan relatif, yang mengukur bagaimana pendapatan tersebar di antara anggota masyarakat serta mencerminkan hasil pembangunan

yang diterima oleh setiap individu atau kelompok. Secara umum, ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi, sumber daya, dan kondisi demografi antar wilayah yang menyebabkan disparitas dalam kemampuan mendorong pembangunan. Menurut Todaro dan Smith (2006), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga distribusi pendapatan nasional menjadi tidak merata.

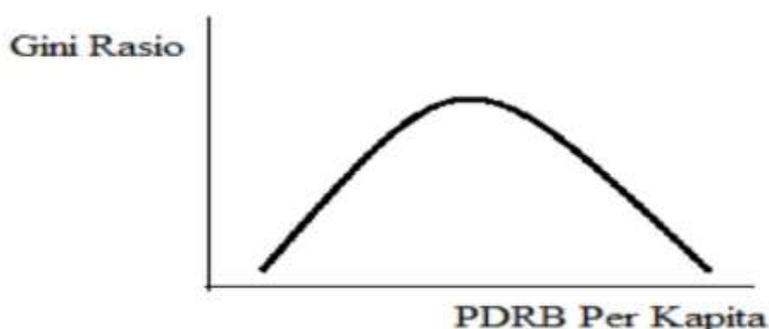
Baldwin (1986) menambahkan bahwa ketimpangan pendapatan menunjukkan perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, yang tercermin dalam perbedaan pendapatan yang signifikan. Kuncoro (2006) juga menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan standar hidup relatif yang berbeda antar wilayah akibat perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia (Gurusinga, 2022). Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah Indeks Gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai berkisar antara 0 (merata sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Ketimpangan ini biasanya lebih tinggi di negara-negara yang baru memulai pembangunan, sementara negara maju cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata.

Teori Kuznet

Teori Kurva Kuznets menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang berbentuk U terbalik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955 melalui studi terhadap negara-negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda. Menurut Kuznets, saat suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan mengalami perubahan bertahap melalui tiga fase utama. Pada fase awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh pergeseran struktur ekonomi dari sektor tradisional, seperti pertanian, ke sektor modern, seperti industri dan jasa. Pada tahap ini, hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki akses ke sektor produktif dengan pendapatan yang lebih tinggi, sementara mayoritas penduduk masih bekerja di sektor tradisional dengan pendapatan yang lebih rendah. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Fenomena ini dapat dilihat di banyak negara berkembang yang baru memulai proses industrialisasi, di mana daerah perkotaan berkembang pesat sementara daerah pedesaan tertinggal.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi mencapai puncak ketimpangan. Pada tahap ini, ketimpangan berada pada titik tertinggi karena hasil dari pertumbuhan ekonomi masih terfokus pada kelompok tertentu. Sektor modern berkembang lebih cepat, sedangkan

sektor tradisional tertinggal. Namun, titik ini bukanlah akhir dari proses, karena setelah melewati fase ini, pola ketimpangan mulai berubah. Ketika ekonomi terus berkembang dan memasuki tahap yang lebih maju, ketimpangan pendapatan secara perlahan mulai menurun. Pada fase ini, berbagai faktor seperti kebijakan redistribusi, peningkatan upah minimum, perluasan akses pendidikan, dan perlindungan sosial berperan penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dengan semakin banyak individu yang mendapatkan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik, jurang antara kelompok kaya dan miskin mulai menyempit. Negara-negara maju di Eropa Barat menunjukkan pola ini dengan ketimpangan berkurang setelah mencapai tingkat pembangunan yang tinggi (Yuliana, 2015). Jika digambarkan pada teori ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kurva Kuznet

Teori Dualisme Pasar Tenaga Kerja

Teori Dualisme Pasar Tenaga Kerja menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja dalam suatu perekonomian terbagi menjadi dua sektor utama yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yaitu sektor primer dan sektor sekunder. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Piore pada tahun 1971, yang mengamati bahwa tidak semua pekerja memiliki kesempatan dan kondisi kerja yang setara meskipun berada dalam lingkungan ekonomi yang sama. Di sektor primer, pekerjaan yang tersedia umumnya menawarkan upah yang tinggi, jaminan sosial yang memadai, dan stabilitas kerja. Pekerja di sektor ini juga memiliki peluang promosi yang jelas dan mobilitas karier yang tinggi. Pekerja akan mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan sering kali bekerja di perusahaan besar atau di sektor formal dengan kontrak kerja jangka panjang. Seperti halnya pekerjaan di sektor primer meliputi manajer perusahaan, profesional di bidang teknologi, pegawai negeri, dan pekerja di industri besar (Rebitzer & Taylor, 2011).

Sebaliknya, sektor sekunder terdiri dari pekerjaan dengan upah rendah, minim jaminan sosial, dan ketidakstabilan kerja. Pekerja di sektor ini sering kali memiliki peluang promosi

yang terbatas dan hanya mendapatkan kontrak kerja sementara atau musiman. Pekerja juga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan yang tinggi dan sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Seperti halnya pekerjaan di sektor ini mencakup buruh pabrik kontrak, pekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, serta pekerja di layanan berbasis platform seperti ojek online (Standing, 2011). Salah satu ciri utama dari teori ini adalah adanya segmentasi pasar tenaga kerja yang menghambat perpindahan pekerja dari sektor sekunder ke sektor primer. Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki keterampilan atau pengalaman kerja, mereka sering kali kesulitan untuk berpindah ke pekerjaan yang lebih baik di sektor primer karena adanya hambatan struktural dan diskriminasi.

Hal ini menyebabkan mobilitas vertikal di pasar tenaga kerja menjadi sangat terbatas, di mana sebagian besar pekerja di sektor sekunder tetap berada dalam kondisi kerja yang kurang menguntungkan dalam jangka panjang. Dampak dari dualisme pasar tenaga kerja ini sangat signifikan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara pekerja di sektor primer dan sekunder semakin memperdalam perbedaan tingkat kesejahteraan. Pekerja yang berada di sektor primer menikmati keamanan finansial dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup, sementara pekerja yang terjebak di sektor sekunder menghadapi kemiskinan yang berkelanjutan. Kondisi ini juga memengaruhi mobilitas sosial, di mana generasi berikutnya dari pekerja di sektor sekunder cenderung mewarisi posisi sosial yang sama tanpa banyak peluang untuk memperbaiki keadaan pekerja.

Teori Human Capital

Teori Human Capital atau Teori Modal Manusia menjelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dianggap sebagai bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Gary S. Becker dan Theodore W. Schultz pada tahun 1960-an. Mereka berpendapat bahwa sumber daya manusia bukan hanya tenaga kerja fisik, tetapi juga aset berharga yang dapat ditingkatkan melalui berbagai bentuk investasi seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Menurut teori ini, individu memiliki kapasitas produktif yang dapat ditingkatkan melalui investasi pada diri mereka sendiri. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang paling penting, karena dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di pasar kerja.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Selain itu, pelatihan di tempat kerja atau pengembangan keterampilan khusus juga memungkinkan

individu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan atau perekonomian secara keseluruhan. Selain pendidikan dan pelatihan, kesehatan juga merupakan aspek penting dalam modal manusia. Individu yang sehat memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dan masa kerja yang lebih panjang. Investasi dalam kesehatan masyarakat, seperti layanan kesehatan yang memadai dan program gizi, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Dengan demikian, investasi dalam human capital tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional (Hasan,2020). Teori ini juga menekankan bahwa modal manusia memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tenaga kerja terampil dan sehat cenderung lebih maju karena mampu memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efisien.

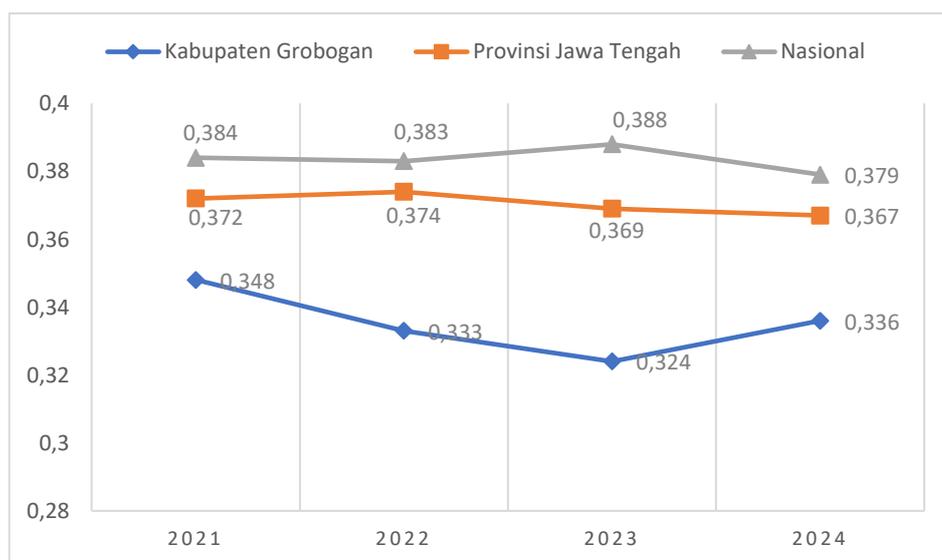
2. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis berdasarkan data numerik yang diperoleh (Sulistiyawati dkk., 2023). Jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini fokus pada penggambaran karakteristik variabel yang diteliti tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu, melainkan memberikan gambaran yang akurat dan objektif mengenai kondisi yang ada berdasarkan data yang tersedia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan mencakup periode waktu antara tahun 2020 hingga 2024.

Variabel utama yang dianalisis adalah Gini Ratio Kabupaten Grobogan, yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan. Selain itu, variabel tambahan seperti garis kemiskinan, Rasio Lama Sekolah (RLS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta Tingkat Partisip[asi Angkatan Kerja juga dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Grobogan. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Tren Gini Ratio, untuk melihat pola perkembangan ketimpangan pendapatan selama periode 2020-2024. Selain itu, juga menggunakan analisis deskriptif perkembangan variabel terkait, yang bertujuan untuk menguraikan kondisi dan perubahan variabel-variabel pendukung seperti RLS, kemiskinan, PDRB per kapita dan TPAK secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang penting untuk terus dipantau dalam proses pembangunan suatu wilayah. Untuk mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Rasio Gini sebagai alat ukur utama. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu wilayah tersebar secara merata atau justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, sehingga memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi (Febriyani *et al.*, 2021). Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Grobogan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, Indeks Gini Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 0,348, kemudian menurun menjadi 0,333 pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 0,324. Namun, pada tahun 2024, Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,336.

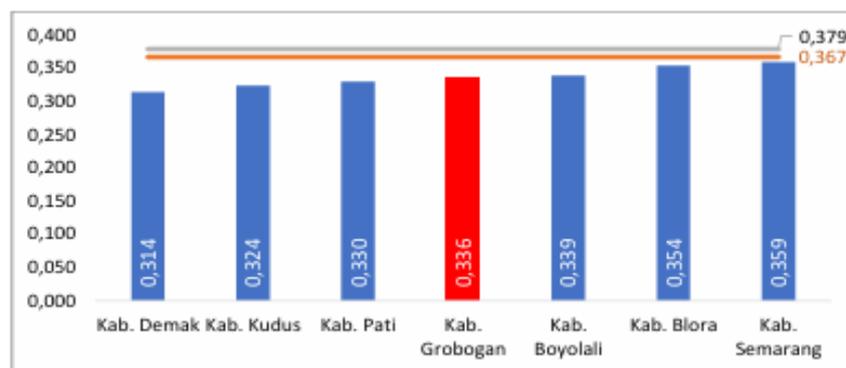


Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021– 2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional, Indeks Gini Kabupaten Grobogan secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2024, Indeks Gini Grobogan mencapai 0,336 lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar 0,367 dan nasional sebesar 0,379. Kemudian jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, Kabupaten Grobogan menempati posisi urutan ke 4 tertinggi Posisinya

lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Demak, Kudus, dan Pati. Namun lebih rendah di bandingkan dengan Kabupaten Boyolali, Blora, dan Semarang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 3. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Fluktuasi Indeks Gini di Kabupaten Grobogan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan sosial-ekonomi. Indeks Gini yang sempat menurun dari 0,348 pada 2021 menjadi 0,324 pada 2023 menunjukkan adanya keberhasilan program-program pemerataan pendapatan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Grobogan sempat menjadi lebih merata, yang disebabkan dari intervensi kebijakan yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pengembangan sektor ekonomi produktif (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Namun, kenaikan kembali Indeks Gini menjadi 0,336 pada 2024 menandakan bahwa ketimpangan mulai meningkat lagi, sehingga perlu evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta identifikasi faktor-faktor baru yang memicu ketimpangan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketimpangan di Grobogan adalah struktur ekonomi yang masih didominasi sektor agraris dengan produktivitas yang relatif rendah. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak merata, terutama jika dibandingkan dengan sektor jasa atau industri yang lebih modern dan produktif. Selain itu, adanya perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian di beberapa kecamatan menyebabkan penurunan luas lahan panen, yang berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan dan ketahanan pangan (Dinas

Pertanian Grobogan, 2023). Ketimpangan ini juga diperparah oleh distribusi sumber daya yang belum merata, seperti akses pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di beberapa wilayah.

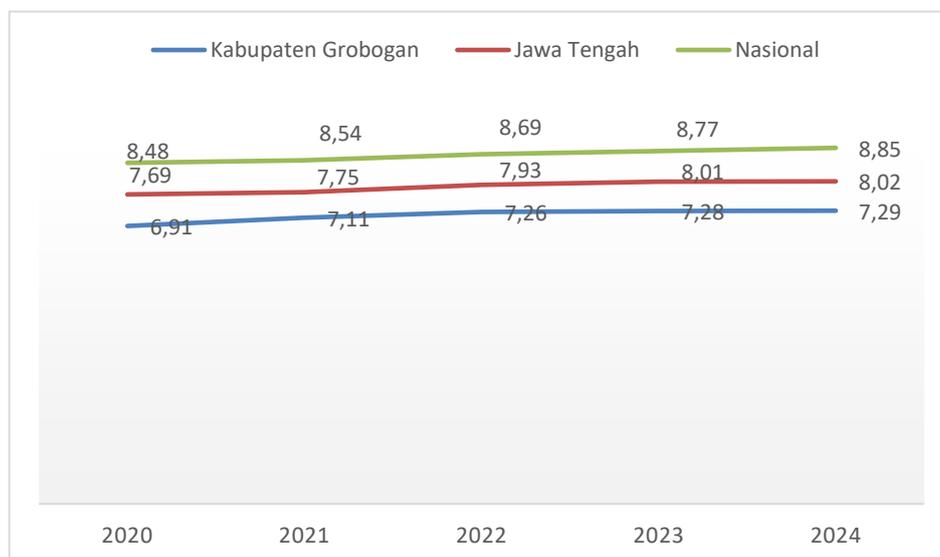
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terkait, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori utama, yaitu Teori Kurva Kuznets, Teori Dualisme Pasar Tenaga Kerja, dan Teori Modal Manusia (Human Capital), yang semuanya dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, kemiskinan, PDRB per kapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang merata menjadi strategi utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan ketimpangan pendapatan dapat ditekan, kemiskinan berkurang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh.

Perkembangan Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2024

Menurut teori *Human Capital*, pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan investasi penting yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu (Becker, 1964; Schultz, 1960). Di Kabupaten Grobogan, perkembangan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan menjadi faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang lebih baik membuka akses ke pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang produktif. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan dapat memperbesar kemiskinan dan ketimpangan (Hasan, 2020). Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas merupakan strategi utama untuk mengatasi ketimpangan di kabupaten Grobogan

RLS merupakan indikator penting yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Grobogan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Grobogan tercatat sebesar 6,91 tahun, kemudian meningkat menjadi 7,29 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Grobogan telah menempuh pendidikan formal selama sekitar 7 tahun, atau setara dengan tingkat pendidikan sekolah dasar hingga awal sekolah menengah pertama. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian RLS Kabupaten Grobogan masih berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Pada tahun 2024, rata-rata lama

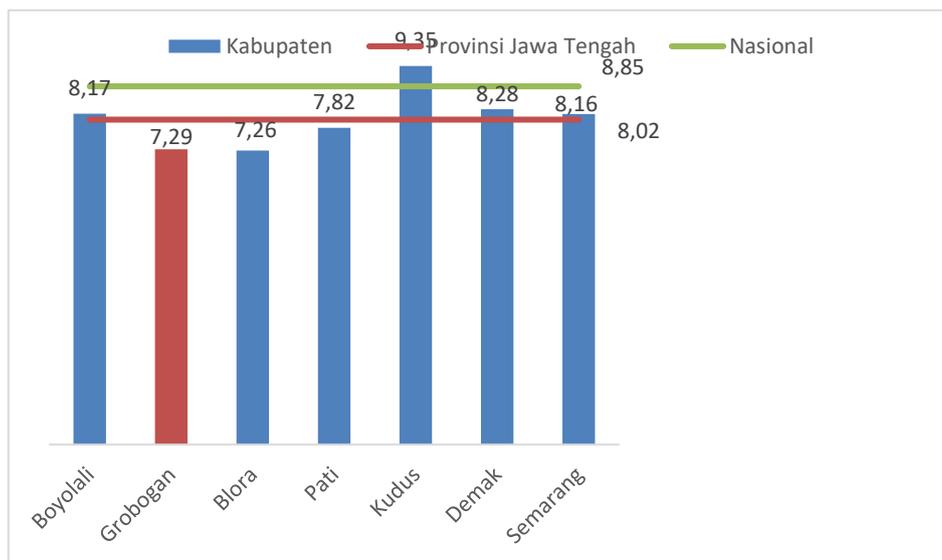
sekolah di Jawa Tengah mencapai 8,02 tahun, sementara nasional berada di angka 8,85 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Grobogan masih perlu ditingkatkan agar dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 4. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 7,29 tahun, menempati posisi urutan ke dua terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Posisinya lebih tinggi dari Kabupaten Blora, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Boyolali, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Grobogan juga masih di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Selengkapannya dapat dilihat pada gambar berikut.



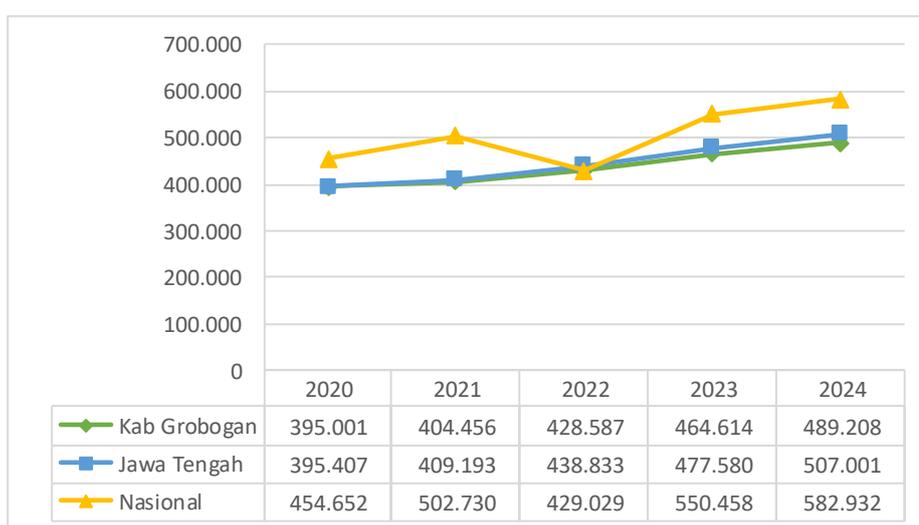
Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 5. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Rata-rata lama sekolah (RLS) yang meningkat dari 6,91 tahun pada 2020 menjadi 7,29 tahun pada 2024 menandakan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan. Namun, capaian ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,02 tahun dan nasional sebesar 8,85 tahun, yang mengindikasikan bahwa kualitas dan pemerataan pendidikan di Grobogan masih perlu ditingkatkan agar dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain (Kurniawan, 2016). Kondisi pendidikan yang belum optimal ini berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan teori modal manusia yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu (Becker, 1964). Dalam penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan merupakan kunci utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan. Pendidikan yang lebih baik akan membuka akses ke lapangan kerja yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara program pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi lokal agar pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

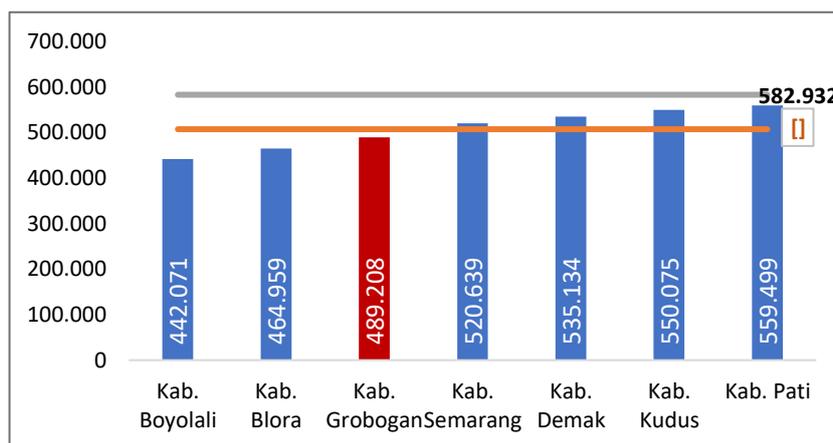
Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), yang mencerminkan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, dengan indikator utama berupa Garis Kemiskinan. Pada tahun 2020 sampai 2024 garis kemiskina Kabupaten Grobogan menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2020 sebesar Rp 395.001 hingga mencapai Rp 489.208 di tahun 2024. Selama lima tahun terakhir garis kemiskinan Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan sebesar Rp 94.201. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Grobogan juga selaras dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 6. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, garis kemiskinan Kabupaten Grobogan menempati posisi urutan ke tiga terendah. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Grobogan sebesar Rp 489.208 menempati posisi lebih rendah dari Kabupaten Semarang, Demak, Kudus dan Pati. Namun lebih tinggi dari Kabupaten Blora dan Boyolali. Kemudian garis kemiskinan Kabupaten Grobogan juga lebih rendah dari garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 7. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Berdasarkan data kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan mengungkapkan adanya tantangan ganda yang kompleks dalam pembangunan sosial-ekonomi Kabupaten Grobogan. Kenaikan garis kemiskinan yang signifikan dari Rp 395.001 pada 2020 menjadi Rp 489.208 pada 2024 menunjukkan tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan garis kemiskinan ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan realitas bahwa kebutuhan dasar masyarakat baik pangan maupun non pangan semakin mahal dan sulit dipenuhi oleh sebagian besar penduduk. Hal ini menandakan bahwa meskipun pendapatan nominal meningkat, daya beli riil masyarakat rentan justru menurun, sehingga risiko kemiskinan struktural dan kemiskinan kronis tetap tinggi.

Kemudian fluktuasi Indeks Gini yang menunjukkan penurunan ketimpangan pada 2022 dan 2023, diikuti dengan kenaikan kembali pada 2024, mengindikasikan ketidakstabilan dalam distribusi pendapatan. Penurunan ketimpangan selama dua tahun tersebut merupakan hasil dari intervensi kebijakan sosial dan ekonomi, seperti program bantuan sosial, subsidi, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, kenaikan kembali ketimpangan pada 2024 menunjukkan bahwa upaya tersebut belum cukup kuat atau belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Ketimpangan yang masih cukup tinggi ini dapat memperparah ketidakadilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memicu ketegangan sosial jika tidak segera ditangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di kabupaten Grobogan masih menghadapi dilema klasik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Sektor-sektor ekonomi yang dominan, seperti pertanian dengan produktivitas rendah, belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal dan memberikan penghasilan yang memadai bagi masyarakat luas. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketimpangan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi. Dalam mengatasi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Program perlindungan sosial harus diperkuat dan diperluas cakupannya agar dapat memberikan jaring pengaman yang efektif bagi kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.

Perkembangan PDRB Per Kapita Grobogan Tahun 2020-2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita mengukur rata-rata nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun, sehingga dapat menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi dan potensi daya beli masyarakat. Data PDRB per kapita Kabupaten Grobogan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Grobogan meningkat dari Rp 18,79 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 24,90 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Grobogan. Namun perlu diperhatikan bahwa ADHB dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi.

Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK), yang sudah disesuaikan dengan inflasi, juga menunjukkan peningkatan dari Rp 13,36 juta pada 2020 menjadi Rp 15,66 juta pada 2024. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi riil di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang stabil selama lima tahun terakhir. Peningkatan PDRB per kapita ini menggambarkan adanya peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi di Kabupaten Grobogan, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, angka PDRB per kapita yang masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata..

Tabel 1. PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB/Kapita (ADHB)/Tahun	Juta Rupiah	18,79	19,67	21,51	23,28	24,90
2.	PDRB/Kapita (ADHK)/Tahun	Juta Rupiah	13,36	13,73	14,41	14,99	15,66

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Grobogan yang menunjukkan peningkatan signifikan selama lima tahun terakhir mencerminkan kemajuan ekonomi yang positif dan peningkatan kapasitas produktivitas daerah. Namun, apabila dianalisis menggunakan Teori Kurva Kuznets, fenomena ini juga dapat menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan. Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal pembangunan ekonomi yang masih dialami Kabupaten Grobogan ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan PDRB per kapita. Hal ini terjadi karena sebagian kelompok masyarakat, terutama yang memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan sektor ekonomi produktif, memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok lain yang masih bergantung pada sektor tradisional dengan produktivitas rendah (Kuznets, 1955; Todaro, 2011).

Data fluktuasi Indeks Gini Kabupaten Grobogan selama 2021-2024 yang menunjukkan penurunan ketimpangan pada 2022 dan 2023, kemudian kenaikan kembali pada 2024, sejalan dengan pola kurva U-terbalik Kuznets. Pada fase awal dan menengah pembangunan, ketimpangan bisa menurun sementara karena intervensi kebijakan dan program sosial yang berhasil meningkatkan pendapatan kelompok rentan. Namun, kenaikan ketimpangan pada 2024 mengindikasikan bahwa proses pemerataan belum stabil dan masih rentan terhadap faktor-faktor struktural seperti ketimpangan akses pendidikan, teknologi, dan pasar (Farhan & Sugianto, 2022; Yuliani, 2015). Menurut Kuznets, ketimpangan pendapatan yang meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh pergeseran struktur ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Di Kabupaten Grobogan, meskipun sektor pertanian masih dominan, ada perkembangan sektor industri dan jasa yang berkontribusi pada pertumbuhan PDRB per kapita. Namun, akses dan kemampuan sebagian besar penduduk untuk berpartisipasi dalam sektor modern ini masih terbatas, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2003; Febrianto, 2017).

Dalam jangka panjang, teori Kuznets memprediksi bahwa ketimpangan pendapatan akan mulai menurun seiring dengan semakin matangnya pembangunan ekonomi dan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Oleh karena itu, untuk

mengakselerasi transisi menuju tahap pemerataan ini, diperlukan kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi yang inklusif, dan perlindungan sosial yang efektif agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Zulfariska & Bariyah, 2021; Alin et al., 2019). Integrasi teori Kuznets dalam analisis kondisi Grobogan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif harus diiringi dengan upaya serius dalam mengelola ketimpangan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengadopsi strategi pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan PDRB per kapita, tetapi juga memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Dengan demikian, Grobogan dapat melewati fase ketimpangan tinggi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja

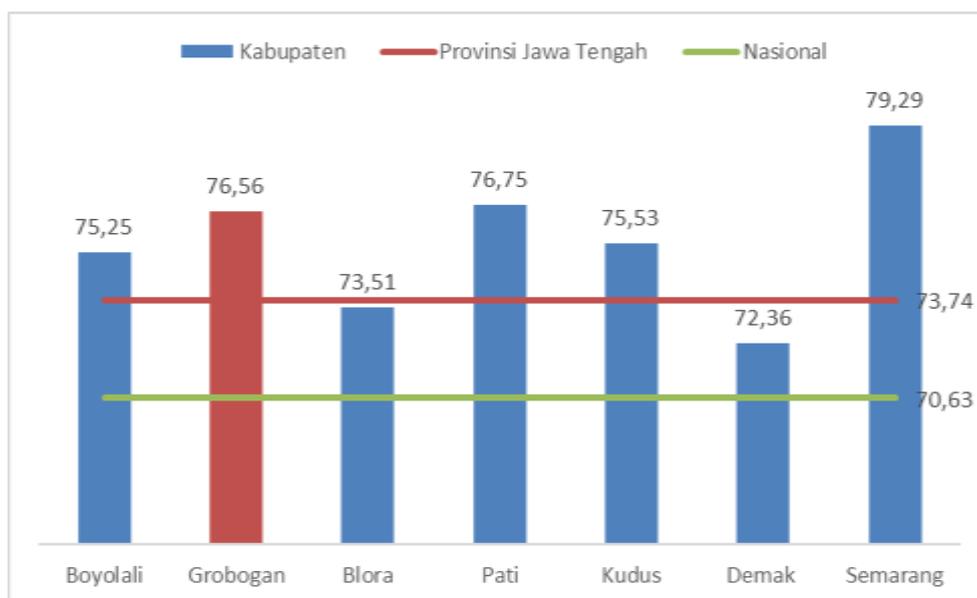
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK mencerminkan sejauh mana penduduk suatu wilayah memanfaatkan peluang kerja yang tersedia dan berperan dalam aktivitas ekonomi. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar pula kontribusi penduduk usia kerja terhadap pembangunan ekonomi daerah. Perkembangan TPAK Kabupaten Grobogan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, TPAK Grobogan tercatat sebesar 69,77%, naik menjadi 72,88% pada 2021, sedikit menurun ke 72,05% pada 2022, namun kembali melonjak menjadi 75,81% pada 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar 76,56% pada 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, TPAK Grobogan secara konsisten berada di atas keduanya, yang menandakan tingginya partisipasi penduduk usia kerja di Kabupaten Grobogan.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 8. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Grobogan berada di posisi urutan ke 3 tertinggi. Posisinya lebih tinggi dari Kabupaten Boyolali, Blora, Kudus, dan Demak. Namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Semarang dan Pati. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 76,56% juga lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 9. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi di Kabupaten Grobogan, bersamaan dengan fluktuasi Indeks Gini, dapat diperdalam dengan kerangka Teori Dualisme Pasar Tenaga Kerja. Meskipun TPAK Grobogan secara konsisten di atas rata-rata provinsi dan nasional mencapai 76,56% pada 2024 yang menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, kondisi ini tidak serta merta berkorelasi positif dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Teori Dualisme Pasar Tenaga Kerja menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja terbagi menjadi dua segmen: pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi, stabilitas, jaminan sosial, serta peluang promosi. Sebaliknya, pasar sekunder dicirikan oleh upah rendah, ketidakstabilan pekerjaan, dan minimnya jaminan sosial, seringkali di sektor informal. Di Kabupaten Grobogan tingginya TPAK, terutama jika didominasi oleh penyerapan di sektor sekunder, dapat menjelaskan terjadinya ketimpangan pendapatan tetap fluktuatif dan bahkan meningkat di tahun 2024 dari 0,324 di 2023 menjadi 0,336 di 2024, meskipun ada peningkatan partisipasi ekonomi secara keseluruhan.

Apabila sebagian besar angkatan kerja yang baru berpartisipasi atau yang sudah ada di pasar tenaga kerja terserap ke sektor sekunder, ini akan menghasilkan peningkatan jumlah pekerja, namun tanpa peningkatan signifikan dalam kualitas pekerjaan atau pendapatan per kapita yang merata. Pekerja di sektor sekunder seringkali memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah, sehingga terjebak dalam lingkaran upah rendah dan kesulitan untuk naik ke sektor primer. Hal ini akan memperlebar kesenjangan antara pekerja di sektor primer yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, dengan pekerja di sektor sekunder yang terpinggirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya "*elit class*" dan "*marginal class*" dalam masyarakat. Fenomena ini juga terkait dengan dualisme ekonomi Boeke yang menyatakan adanya dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat: satu bersifat pra-kapitalistik (penduduk asli) dan satu lagi bersifat kapitalistik (impor dari Barat).

Di Grobogan dapat dimaknai sebagai sektor tradisional seperti pertanian dengan skala kecil yang menyerap banyak tenaga kerja namun dengan pendapatan terbatas, berdampingan dengan sektor modern (industri pengolahan atau jasa) yang lebih produktif tetapi membutuhkan keterampilan spesifik dan menyerap tenaga kerja secara terbatas. Jika transformasi struktural yaitu pergeseran penyerapan tenaga kerja sektoral dari pertanian ke industri, tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang memadai, dualisme ini akan memperkuat ketimpangan. Oleh karena itu, meskipun TPAK Kabupaten Grobogan yang tinggi menunjukkan potensi sumber daya manusia yang besar, analisis ini menekankan pentingnya kualitas penyerapan

tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu fokus pada kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kuantitas partisipasi angkatan kerja, tetapi juga mendorong transisi pekerja dari sektor sekunder ke primer melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor modern. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja berkualitas menjadi krusial untuk mengurangi ketimpangan. Tanpa intervensi tersebut, tingginya TPAK justru dapat menjadi indikator adanya masalah struktural dalam pasar tenaga kerja yang memperparah ketimpangan pendapatan

4. KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai perkembangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan Kabupaten Grobogan mengalami perubahan yang berfluktuasi dengan tren menurun hingga tahun 2023, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024. Penurunan ketimpangan ini sejalan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan tingkat kemiskinan, serta pertumbuhan PDRB per kapita. Meski demikian, dominasi sektor informal yang memiliki produktivitas dan pendapatan rendah serta ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang adil.

Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat yang menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tanpa peningkatan kualitas pekerjaan dan keterampilan tenaga kerja, ketimpangan pendapatan berisiko tetap berlanjut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memperkuat sinergi antara program pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan sektor produktif, dan perlindungan sosial guna menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2019). *Inclusive Economic Development: Strategies and Policies*. Journal of Development Studies, 55(4), 567-583. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1501234>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha 2019-2024*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2024). *Statistik Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan*.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (n.d.). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*. Diakses dari <https://grobogankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAyIzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak-.html> 7
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Statistik Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah*. Diakses dari <https://data.jatengprov.go.id/main/?slug=berita-statistik&cat=gini-ratio>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Baldwin, R. E. (1986). *Economic Development and Income Distribution*. Harvard University Press.
- Farhan, A., & Sugianto, A. (2022). Dinamika Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Oikos*.
- Febrianto, R. (2017). *Landasan Teori Ketimpangan Pendapatan dan Kurva Kuznets*. Repositori Untidar.
- Gurusinga, E. B. (2022). Ketimpangan Pendapatan: Konsep dan Pengukuran. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/44779/40714/101800>
- Hasan, M. (2020). *Human Capital Management (Teori dan Aplikasi)*. Universitas Negeri Makassar. Diakses dari [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7479/1/Buku%20Digital%20-%20Human%20Capital%20Management%20\(Teori%20dan%20Aplikasi\)%20\(2\).pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7479/1/Buku%20Digital%20-%20Human%20Capital%20Management%20(Teori%20dan%20Aplikasi)%20(2).pdf)
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, J. (2016). *Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan*. Garuda Kemdikbud.
- Ravallion, M. (2014). *Income Inequality in the Developing World*. *Science*, 344(6186), 851-855. <https://doi.org/10.1126/science.1251875>
- Rebitzer, J. B., & Taylor, L. J. (2011). *Labor Market Segmentation*. In D. Card & O. Ashenfelter (Eds.), *Handbook of Labor Economics* (Vol. 4, pp. 103–155). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0169-7218\(11\)02404-6](https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02404-6)
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.
- Sulistiyawati, Wahyudi. (2023). Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(3).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan)*. (Drs. Haris Journal Of Macroeconomics And Social Development, Volume: 1, Nomor 2, 2023 12

Of 12 <https://Economics.Pubmedia.Id/Index.Php/Jmsd> Munandar, Ma Dan Puji A.L., Se, Pentj). In Jakarta: Penerbit Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.

Yuliani, E. (2015). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 10-20.

Zulfariska, A., & Bariyah, N. (2021). Hipotesis U-Terbalik Kuznets dan Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.